

TAHAPAN & TATACARA PENYUSUNAN RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH (RPD)

NITA YISWA, ST, M.Si

Tenaga Ahli Perencanaan dan Kebijakan Publik
08129347000 / nitayiswa01@gmail.com

Rapat Konsolidasi Penyusunan Rancangan Awal RPD Tahun 2024-2026
Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur
8 November 2022

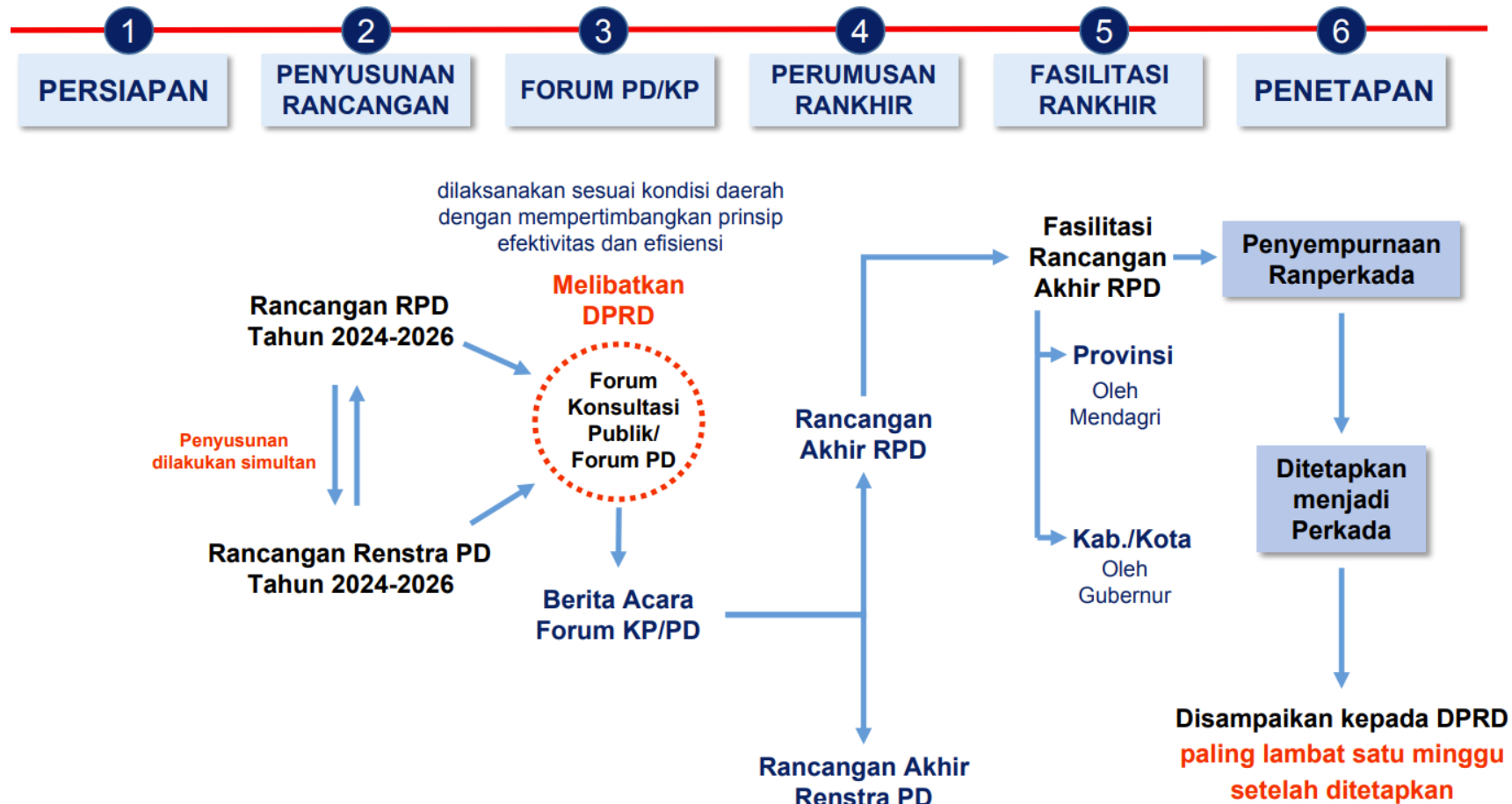
LATAR BELAKANG PENYUSUNAN RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH (RPD)

(Rancangan Inmendagri tentang Penyusunan Dokumen Rencana Pembangunan Daerah
Bagi Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Pada Tahun 2023 dan Daerah Otonom Baru (DOB))

- ❑ Amanat **Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016** salah satunya adalah dilaksanakan **pemilu kepala daerah serentak secara nasional pada tahun 2024**.
- ❑ Gubernur yang habis masa jabatannya tahun 2023 menyusun Dokumen Perencanaan Pembangunan Menengah Daerah Tahun 2024-2026 yang selanjutnya disebut sebagai **Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Provinsi Tahun 2024-2026**, serta memerintahkan seluruh kepala perangkat daerah untuk menyusun **Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) Provinsi Tahun 2024-2026**.
- ❑ Dokumen RPD Tahun 2024-2026 akan digunakan Pejabat (Pj.) Kepala Daerah sebagai pedoman untuk penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah Tahun 2024-2026.
- ❑ Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2024-2026 dan Renstra PD Tahun 2024-2026 ditetapkan dengan Perkada.

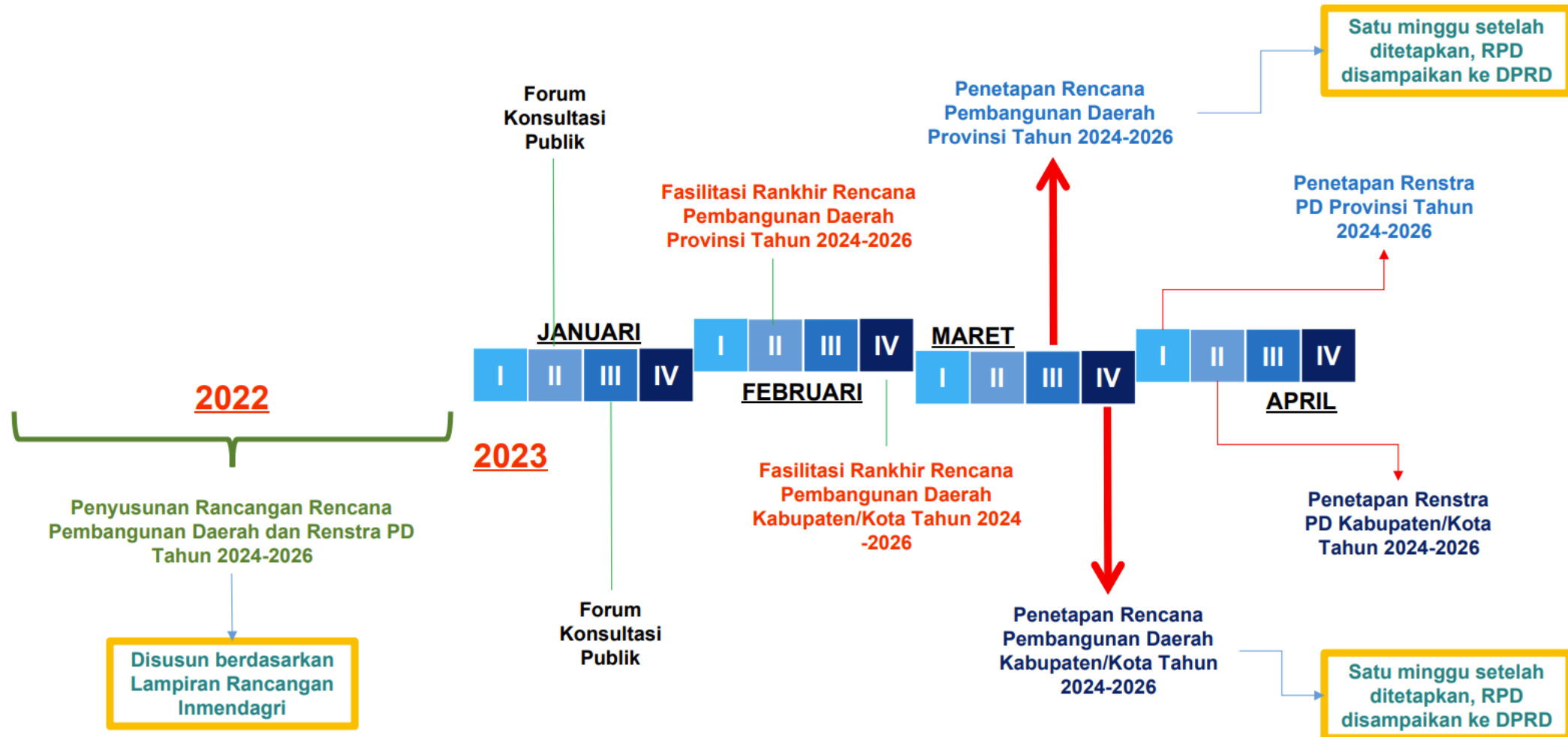
TAHAPAN PENYUSUNAN RPD & RENSTRA PD

(Rancangan Inmendagri tentang Penyusunan Dokumen Rencana Pembangunan Daerah
Bagi Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Pada Tahun 2023 dan Daerah Otonom Baru (DOB))



TAHAPAN PENYUSUNAN RPD & RENSTRA PD

(Rancangan Inmendagri tentang Penyusunan Dokumen Rencana Pembangunan Daerah
Bagi Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Pada Tahun 2023 dan Daerah Otonom Baru (DOB))



SISTEMATIKA RPD DAN RENSTRA PD

(Rancangan Inmendagri tentang Penyusunan Dokumen Rencana Pembangunan Daerah
Bagi Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Pada Tahun 2023 dan Daerah Otonom Baru (DOB))

RPD

BAB I	PENDAHULUAN
BAB II	GAMBARAN UMUM
BAB III	GAMBARAN KEUANGAN DAERAH
BAB IV	PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS
BAB V	TUJUAN DAN SASARAN
BAB VI	STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN, DAN PROGRAM PRIORITAS
BAB VII	KERANGKA PENDANAAN PEMBANGUNAN DAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH
BAB VIII	KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH
BAB IX	PENUTUP

RENSTRA PD

BAB I	PENDAHULUAN
BAB II	GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH
BAB III	PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH
BAB IV	TUJUAN DAN SASARAN
BAB V	STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN
BAB VI	RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN
BAB VII	KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN
BAB VIII	PENUTUP

SISTEMATIKA RANCANGAN RPD

BAB I	PENDAHULUAN
1.1.	Latar Belakang
1.2	Dasar Hukum
1.3	Hubungan Antar Dokumen
1.4	Maksud dan Tujuan
1.5	Sistematika Penulisan
BAB II	GAMBARAN UMUM
2.1	Aspek Geografi dan Demografi
2.2	Aspek Kesejahteraan Masyarakat
2.3	Aspek Pelayanan Umum
2.4	Aspek Daya Saing Daerah
BAB III	GAMBARAN KEUANGAN DAERAH
3,1	Kinerja Keuangan Masa Lalu
3.2	Kebijakan Pengelolaan Keuangan Masa Lalu
3.3	Kerangka Pendanaan

BAB IV	PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS
4.1	Permasalahan Pembangunan
4.2	Isu Strategis
BAB V	TUJUAN DAN SASARAN
BAB VI	STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN DAN PROGRAM PRIORITAS
BAB VII	KERANGKA PENDANAAN DAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH
BAB VIII	KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH
BAB IX	PENUTUP

PERSIAPAN PENYUSUNAN RPD

(optional)



BAB II. GAMBARAN UMUM

ASPEK GEOGRAFI DAN DEMOGRAFI

Karakteristik lokasi
dan Wilayah

Potensi
Pengembangan
Wilayah

Wilayah rawan
Bencana

Demografi

ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT

Kesejahteraan dan
Pemerataan Ekonomi

Kesejahteraan sosial

Dst..

ASPEK PELAYANAN UMUM

Pelayanan Urusan
Pemerintahan Wajib

Pelayanan Urusan
Pemerintahan Pilihan

Dst..

ASPEK DAYA SAING DAERAH

Kemampuan Ekonomi

Fasilitas
Wilayah/Infrastruktur

Dst...

ANALISIS DATA DAN INFORMASI UNTUK MENGIDENTIFIKASI KINERJA PEMERINTAHAN DAERAH

Tabel T-B.1.

Hasil Analisis Gambaran Umum Kondisi Daerah
Terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
Provinsi/Kabupaten/Kota.....*)

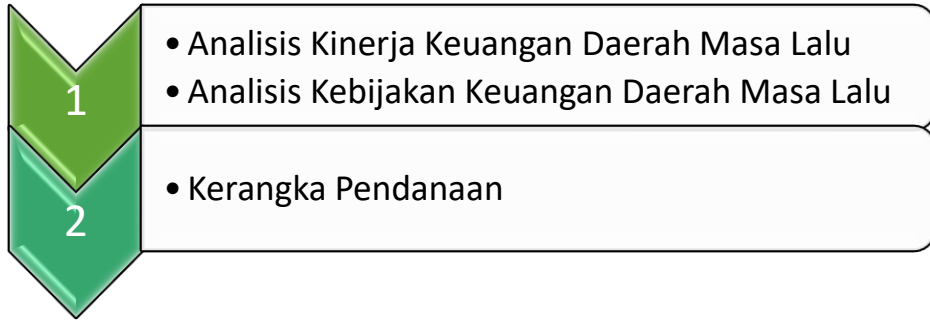
No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Target kinerja					Realisasi Kinerja					Interpretasi belum tercapai (<); sesuai (=); melampaui (>)
		(n-5)	(n-4)	(n-3)	(n-2)	(n-1)**)	(n-5)	(n-4)	(n-3)	(n-2)	(n-1)**)	
	KESEJAHTERAAN MASYARAKAT											
1.1.	Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi											
1.1.1.	Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi keuangan daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian											
1.1.1.1	Pertumbuhan PDRB											
1.1.1.2	Laju inflasi											
1.1.1.3	PDRB per kapita											
1.1.1.4	Dst....											
1.2.	Kesejahteraan Sosial											
1.2.1	Pendidikan											
1.2.1.1	Angka melek huruf											
1.2.1.2	Angka rata-rata lama sekolah											
1.2.1.3	Dst											
1.3.	Dst											
1.3.1	Dst....											
	PELAYANAN UMUM											
2.1	Pelayanan Urusan Pemerintahan Wajib											
	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan dengan Pelayanan Dasar											
2.1.1	Pendidikan											
2.1.1.1	Pendidikan dasar											
2.1.1.1.1	Angka partisipasi sekolah											
2.1.1.1.2	Rasio ketersediaan sekolah/penduduk usia sekolah											

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Target kinerja					Realisasi Kinerja					Interpretasi belum tercapai (<); sesuai (=); melampaui (>)
		(n-5)	(n-4)	(n-3)	(n-2)	(n-1)**)	(n-5)	(n-4)	(n-3)	(n-2)	(n-1)**)	
	satuan penduduk											
2.1.2.3	Dst....											
2.1.3	Dst....											
2.1.3.1	Dst....											
	Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak Berkaitan dengan Pelayanan Dasar											
	Tenaga kerja											
	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja											
	Angka Pengangguran											
	Dst....											
2.2	Pelayanan Urusan pemerintahan Pilihan											
2.2.1	Pertanian											
2.2.1.1	Produktivitas padi atau bahan pangan utama lokal lainnya per hektar											
2.2.1.2	Kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB											
2.2.2	Kehutanan											
2.2.2.1	Rehabilitasi hutan dan lahan kritis											
2.2.2.2	Kerusakan Kawasan Hutan											
2.2.2.3	Dst....											
2.2.3	Dst....											
2.2.3.1	Dst.....											
	DAYA SAING DAERAH											
3.1	Kemampuan Ekonomi											
3.1.1	Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi keuangan daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian											
3.1.1.1	Pengeluaran konsumsi rumah tangga per kapita											
3.1.1.2	Pengeluaran konsumsi non pangan perkapita											
3.1.1.3	Produktivitas total daerah											
3.1.1.4	Dst											

- Interpretasi sekurang-kurangnya mengemukakan ada/tidaknya kesenjangan/gap pelayanan. Pada pelayanan mana saja **target telah tercapai dan belum tercapai** serta faktor apa saja yang mempengaruhi keberhasilan pelayanan dan faktor yang mempengaruhi belum berhasilnya pelayanan tersebut.
- Hasil interpretasi ini ditujukan untuk **menggambarkan potensi dan permasalahan pelayanan Daerah** ditinjau dari kinerja pelayanan periode sebelumnya.

BAB III.

GAMBARAN KEUANGAN DAERAH

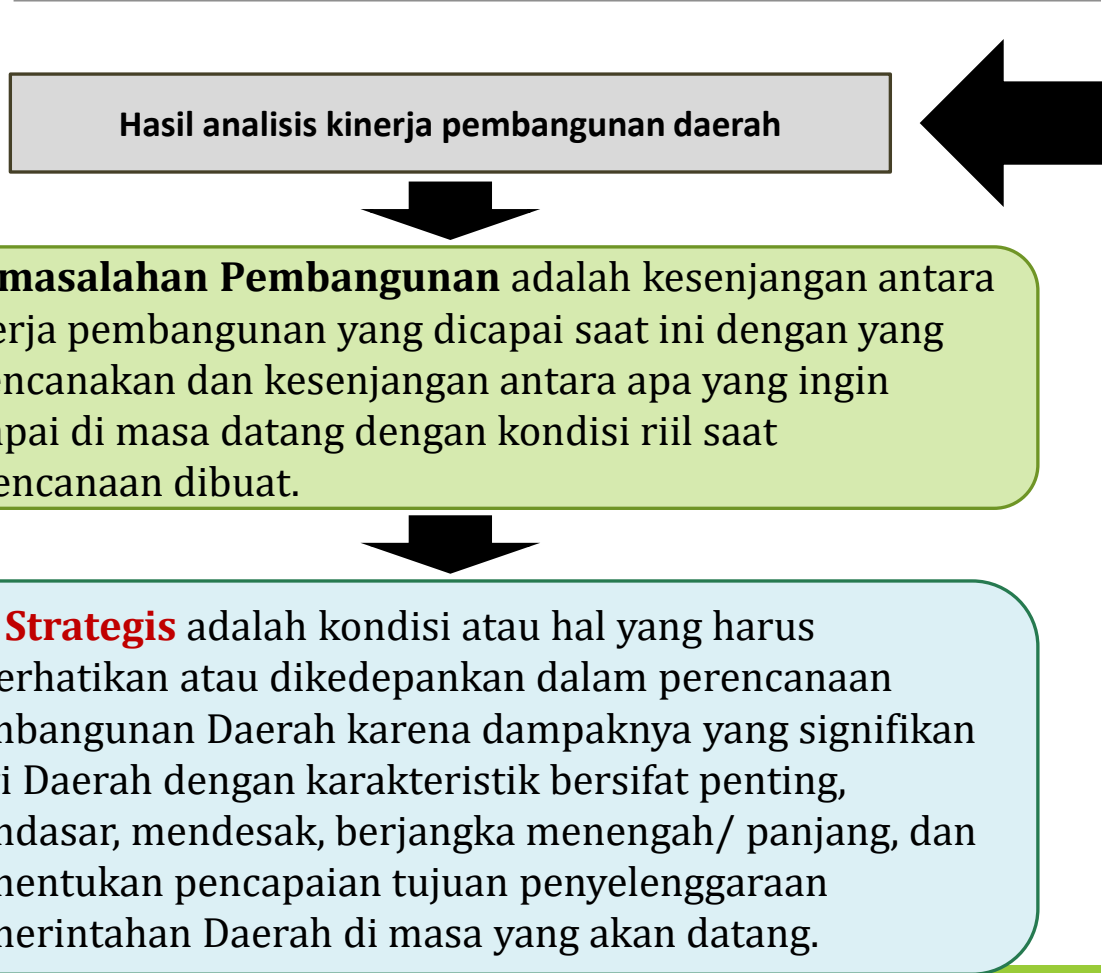


Untuk membiayai pembangunan daerah jangka menengah, kapasitas keuangan daerah dapat dialokasikan kedalam 3 prioritas, sbb:

- 1) **Prioritas I**, dialokasikan untuk membiayai belanja dan pengeluaran pembiayaan yang wajib dan mengikat.
- 2) **Prioritas II**, dialokasikan untuk membiayai belanja penerapan pelayanan dasar dan program prioritas.
- 3) **Prioritas III**, dialokasikan untuk membiayai belanja penyelenggaraan urusan pemerintahan lainnya.

PENDAPATAN	BELANJA	PEMBIAYAAN
Pendapatan Asli Daerah <ul style="list-style-type: none"> ➢ Pajak Daerah ➢ Retribusi Daerah ➢ Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yg Dipisahkan ➢ Lain –lain PAD yg Sah Pendapatan Transfer <ul style="list-style-type: none"> ➢ Transfer Pemerintah Pusat ➢ Transfer Antar Daerah Lain-lain Pendapatan Daerah yg Sah <ul style="list-style-type: none"> ➢ Hibah ➢ Dana Darurat ➢ Lain-Lain Pendapatan 	Belanja Operasi <ul style="list-style-type: none"> ➢ B. Pegawai ➢ B. Barang & Jasa ➢ B. Bunga ➢ B. Subsidi ➢ B. Hibah ➢ B. Bantuan Sosial Belanja Modal <ul style="list-style-type: none"> ➢ B. M. Tanah ➢ B. M. Peralatan & Mesin ➢ B. M. Gedung & Bangunan ➢ B. M. Jalan, Jaringan & Irigasi ➢ B. M. Aset Tetap Lainnya Belanja Tidak Terduga Belanja Transfer <ul style="list-style-type: none"> ➢ B. Bagi Hasil ➢ B. Bantuan Keuangan 	Penerimaan Pembiayaan <ul style="list-style-type: none"> ➢ SiLPA ➢ Pencairan Dana Cadangan ➢ Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yg Dipisahkan ➢ Penerimaan Pinjaman Daerah ➢ Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah ➢ Penerimaan Pembiayaan Lainnya Sesuai Ketentuan PUU Pengeluaran Pembiayaan <ul style="list-style-type: none"> ➢ Pembentukan Dana Cadangan ➢ Penyertaan Modal Daerah ➢ Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo ➢ Pemberian Pinjaman Daerah ➢ Pengeluaran Pembiayaan Lainnya sesuai PUU

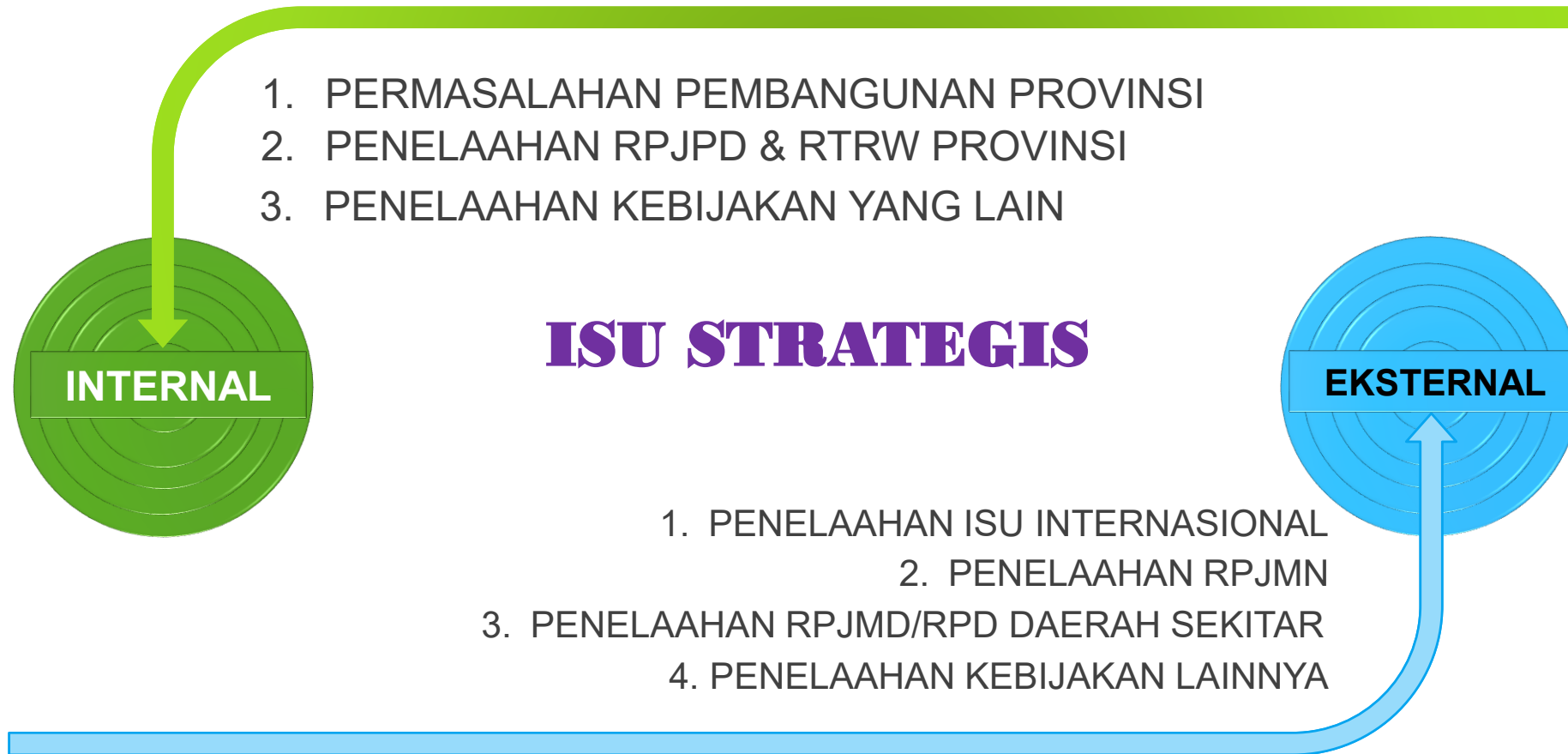
BAB IV. PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS



Tabel T-B.36.
Identifikasi Permasalahan untuk Penentuan Program Prioritas
Provinsi/Kabupaten/kota.....*)

No	Bidang Urusan Dan Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Interpretasi Belum Tercapai (<) Sesuai (=) Melampaui (>)	Permasalahan	Faktor –Faktor Penentu Keberhasilan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Pendidikan			
1.1.	Angka melek huruf			
1.2.	Angka rata-rata lama sekolah			
1.3.	Pendidikan dasar:			
1.3.1.	Angka partisipasi sekolah			
1.3.2.	Rasio ketersediaan sekolah/penduduk usia sekolah			
1.3.3.	Rasio guru/murid			
1.4.	Dst....			
2.	Kesehatan			
2.1.	Angka kelangsungan hidup bayi			
2.2.	Angka usia harapan hidup			
2.3.	Persentase balita gizi buruk			
2.4.	Rasio posyandu per satuan balita			
2.5.	Rasio puskesmas, poliklinik, pustu per satuan penduduk			
2.6.	Rasio Rumah Sakit per satuan penduduk			
2.7.	Dst....			
3.	Pekerjaan Umum			
3.1.	Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik			
3.2.	Rasio jaringan irigasi			
3.3.	Rasio tempat ibadah per satuan penduduk			
3.4.	Persentase rumah tinggal bersanitasi			
3.5.	Rasio tempat pemakaman umum per satuan penduduk			
3.6.	Dst.....			

Perumusan Isu Strategis



BAB V.

TUJUAN DAN SASARAN

TUJUAN

- Sesuatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) tahunan.

SASARAN

- Rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan Daerah yang diperoleh dari pencapaian hasil (*outcome*) program Perangkat Daerah.

- ☐ Penentuan tujuan dan sasaran RPD Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun 2024-2026 didasarkan **visi misi RPJPD, analisa sasaran pokok dan arah kebijakan RPJPD Tahap Keempat, dan isu strategis aktual.**
- ☐ Tujuan dan sasaran paling sedikit mengindikasikan peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik dan daya saing Daerah serta kualitas lingkungan hidup.

No	Tujuan	Sasaran	Indikator	Kondisi Awal		Target Capaian			Kondisi Akhir
				Tahun 2022 (Realisasi)	Tahun 2023 (Target)	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	

BAB VI.

STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN, DAN PROGRAM PRIORITAS

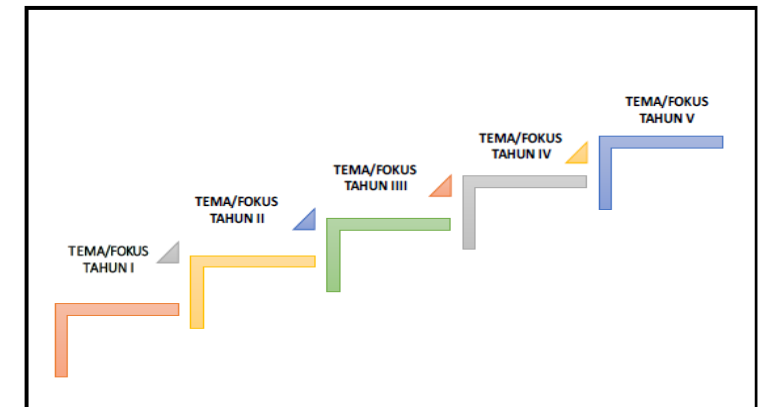
STRATEGI

- langkah berisikan program-program sebagai prioritas pembangunan Daerah untuk mencapai sasaran.
- merupakan rangkaian tahapan atau langkah-langkah yang berisikan grand design perencanaan pembangunan dalam upaya untuk mewujudkan tujuan dan sasaran misi pembangunan daerah yang telah ditetapkan

ARAH KEBIJAKAN

- rumusan kerangka pikir atau kerangka kerja untuk menyelesaikan permasalahan pembangunan dan mengantisipasi isu strategis Daerah yang dilaksanakan secara bertahap sebagai penjabaran strategi.
- bentuk konkrit dari usaha pelaksanaan perencanaan pembangunan yang memberikan arahan dan panduan kepada pemda agar lebih optimal dalam menentukan dan mencapai tujuan
- merupakan pedoman untuk menentukan tahapan pembangunan guna mencapai sasaran RPD secara bertahap

No	Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan



Tema/Fokus Pembangunan

**Program Prioritas yang disertai Pagu Indikatif
Provinsi/Kabupaten/Kota**

[illegible]

- **Program Prioritas** adalah program strategis Daerah yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah sebagai instrumen arah kebijakan untuk **mencapai tujuan dan sasaran RPD**.

BAB VII. KERANGKA PENDANAAN DAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH

Program adalah penjabaran kebijakan Perangkat Daerah dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan tugas dan fungsi.

Indikasi Rencana Program Perangkat Daerah yang Disertai Kebutuhan Pendanaan Provinsi/Kabupaten/Kota.....

[illegible]

Penyusunan Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan dalam RPD dan Renstra PD

- ❑ Penyusunan program, kegiatan, dan sub kegiatan dalam RPD dan Renstra PD akan memperhatikan:
 - a. Penyelarasan program prioritas nasional dalam RPJMN Tahun 2020-2024.
 - b. Evaluasi hasil capaian kinerja tujuan, sasaran dan hasil (outcome) Renstra PD masing-masing melalui evaluasi capaian RKPD atau Renja PD sampai dengan tahun 2022.
 - c. Evaluasi kontribusi keluaran (output) dari seluruh kegiatan/subkegiatan sampai dengan tahun 2022 dalam pencapaian hasil (outcome).
 - d. Isu-isu strategis yang terkait dengan bidang urusan dan tugas pokok dan fungsi perangkat daerah.
 - e. Kebijakan nasional.
 - f. Regulasi yang berlaku.
 - g. Saran dan/atau masukan dari pemangku kepentingan pembangunan daerah.
- ❑ Menggunakan klasifikasi, kodefikasi, dan nomenklatur program, kegiatan, dan sub kegiatan yang diatur dalam Kepmendagri yang berlaku.

BAB VIII.

KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH

Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU)
Provinsi/Kabupaten/Kota....*)

No	Indikator	Target Tahun ke-				
		1	2	3	4	5

Indikator Kinerja Utama (IKU) diambil dari indikator sasaran strategik RPJMD

Penetapan Indikator Kinerja Daerah
Terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan
Urusan Pemerintahan
Provinsi/Kabupaten/Kota

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Kondisi Awal		Target Capaian			Kondisi Akhir
		Tahun 2022 (Realisasi)	Tahun 2023 (Target)	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	

PENERAPAN INDIKATOR KINERJA DALAM RPD

RPD
1. PENDAHULUAN
2. GAMBARAN UMUM
3. GAMBARAN KEUANGAN DAERAH
4. PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS
5. TUJUAN DAN SASARAN
6. STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN DAN PROGRAM PRIORITAS
7. KERANGKA PENDANAAN PEMBANGUNAN DAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH
8. KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH
9. PENUTUP

- IK tingkat dampak (impact) >> 5 thn terakhir
- IK tingkat hasil (outcome) >> 5 thn terakhir
- IK lainnya yang digunakan pada RPJMD periode lalu

- IK tingkat dampak (impact) >> 3 thn yg akan datang

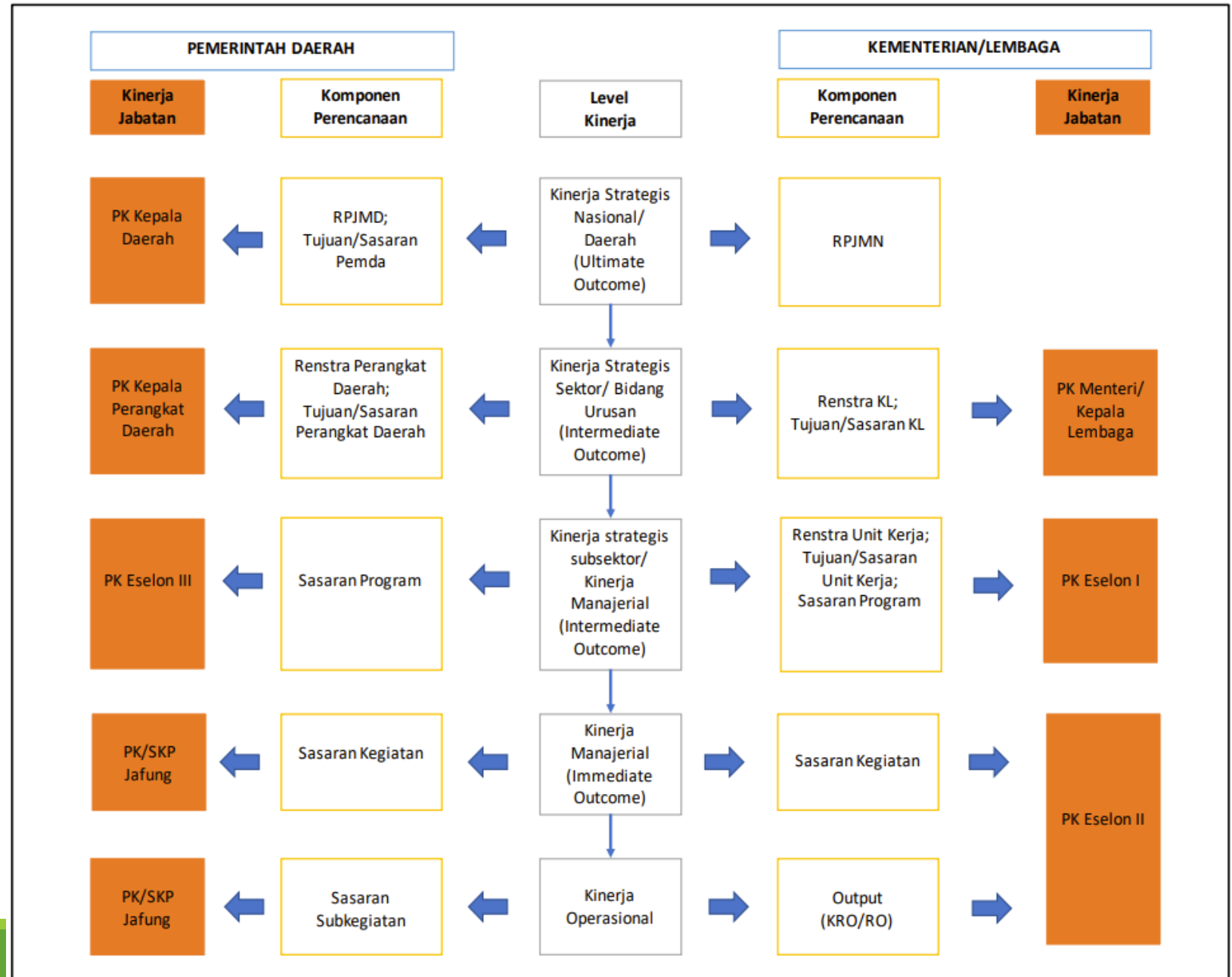
- IK tingkat hasil (outcome) >> 3 thn yg akan datang

- IK tingkat dampak (impact) RPJMD >> 3 thn yg akan datang
- IK tingkat dampak (impact) seluruh Renstra PD >> 3 thn yg akan datang
- IK tingkat hasil (outcome) >> 3 thn yg akan datang

SKEMA PENUANGAN POHON KINERJA KE KOMPONEN PERENCANAAN DAN KINERJA JABATAN

Kinerja tiap jabatan pada Pemerintah Daerah:

- Kinerja strategis daerah** sebagai ukuran kinerja **Kepala Daerah**
- Kinerja strategis bidang urusan** sebagai ukuran kinerja **Kepala Perangkat Daerah**
- Kinerja taktikal (*intermediate outcome*)** sebagai **kinerja Eselon III**
- Kinerja taktikal (*immediate outcome*) dan operasional (*output aktivitas*)** sebagai **kinerja Eselon IV/Jabatan Fungsional**.



TERIMA KASIH

Nita Yiswa - 08129347000

nitayiswa01@gmail.com-08129347000